

PERUBAHAN RENJA

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2026



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

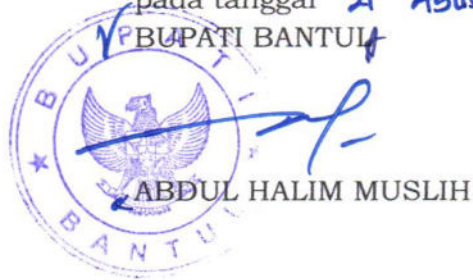
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 21 Agustus 2026

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 21 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
					6		7		8		9		10				11				12		13		14 = 13	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	16	17		
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			33.955.768.551		6.261.346.402		6.903.764.832		478.303.897		1.857.885.416						2.336.189.313		2.336.189.313	11,44	6,88		
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			29.954.181.765		5.634.461.064		6.366.480.332		435.300.542		1.614.815.308						2.050.115.850		2.050.115.850	13,91	6,84	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	88,51		0		88,11		0		0					0		0		0	0			
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	85,1		0		83,90		0		0					0		0		0	0			
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			93.000.000		16.090.000		3.450.000		2.450.000		500.000						2.950.000		2.950.000	6,67	3,17		
			Terlaksananya perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60		6		6		3		1					4		4		6,67	0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3					6		6		10	0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	60		4		4		1		1					2		2		3,33	0			
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			33.000.000		9.000.000		2.250.000		1.950.000		300.000						2.250.000		2.250.000	6,67	6,82		
		2.18.01.2.01.0006	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60		6		6		3		1					4		4		6,67	0			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60	30.000.000	12	4.500.000	600.000		3	200.000	3	200.000				6	400.000	6	400.000	10	1,33			
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12													10	0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.18.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000		2.590.000		600.000		300.000		-					300.000		300.000	3,33	1			
			Terlaksana nya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	60		4		4		1		1					2		2		3,33	0			
		2.18.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.817.877.871		4.622.844.160		5.446.885.300		364.870.433		1.409.264.761					1.774.135.194		1.774.135.194	26,7	7,78			
			Terlaksananya penatausahaa n keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		30, 25		32		35		35					35		17,5		50	0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		1		1					2		2		3,33	0			
		2.18.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.474.077.871		4.554.089.160		5.378.725.300		347.830.433		1.397.924.761					1.745.755.194		1.745.755.194	50	7,77			
		2.18.0 1.2.02. 0002	Tersediany a Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		30, 25		32		35		35					35		17,5		50	0			
			Tersediany a Administra si Pelaksana an Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		1		1					2		2		3,33	0			
		2.18.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			400.000.000		67.599.800		2.400.000		-		-					-		-	0	0			
			Terselenggaran ya pengelolaan kepegawaian yang efektif dan efisien.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	400		60		80		0		0					0		0		0	0			
		2.18.0 1.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			400.000.000		67.599.800		2.400.000		-		-					-		-	0	0			
			Terlaksana nya Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	400		60		80		0		0					0		0		0	0			
		2.18.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.948.728.634		326.572.618		101.730.410		17.774.630		39.727.700					57.502.330		57.502.330	9,64	2,95			
			Terselenggaran ya pelayanan administrasi yang efektif dan efisien, serta tersedianya dokumen dan laporan yang akurat dan tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		0					1		1		10	0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1		0					1		1		4	0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		0					1		1		10	0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1		2					3		3		12	0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		6		6		1		0					1		1		3,33	0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		3		3					6		6		10	0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		3		3					6		6		10	0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	25		5		5		4		0					4		4		16	0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	35		7		7		4		0					4		4		11,4	0			
	2.18.0 1.2.06. 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersediany a Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	80.000.000	2	14.000.527	2	6.297.930	1	1.274.130	0	3.575.400					1	4.849.530	1	4.849.530	10	6,06		
	2.18.0 1.2.06. 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			480.000.000		89.285.199		9.590.000		5.745.000		3.795.000						9.540.000		9.540.000	4	1,99		
			Tersediany a Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1		0					1		1		4	0			
	2.18.0 1.2.06. 0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			243.000.000		36.444.292		31.183.280		4.580.700		11.332.300						15.913.000		15.913.000	10	6,55		
			Tersediany a Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		0					1		1		10	0			
	2.18.0 1.2.06. 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			296.288.455		42.513.100		3.891.200		300.000		1.550.000						1.850.000		1.850.000	12	0,62		
			Tersediany a Barang Cetak dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1		2					3		3		12	0			
2.18.0 1.2.06. 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			44.963.250		6.600.000		1.500.000		374.800		340.000						714.800		714.800	3,33	1,59			
2.18.0 1.2.06. 0008		Tersediany a Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		6		6		1		0					1		1		3,33	0				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu				143.882.400				18.245.000							11.100.000				2.450.000				3.800.000	
	2.18.0 1.2.06. 0009		Terlaksana nya Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		3		3					6		6		10	0			
						569.018.029		105.979.500		36.968.000		2.750.000		15.035.000				17.785.000		17.785.000	10	3,13				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
											I		II		III		IV			14 = 13		15=14/6 x100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		2.18.0 1.2.06. 0010	Terlaksana nya Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		3		3						6		6		10	0			
					45.788.250	6.217.500	600.000	-	-																		
			Terlaksana nya Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	25		5		5		4		0						4		4		16	0			
		2.18.0 1.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				45.788.250		7.287.500		600.000		300.000		300.000					600.000		600.000		11,4	1,31		
		Terlaksana nya Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	35		7		7		4		0						4		4		11,4	0				
	2.18.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.473.555.260		95.576.536		255.350.272		33.211.979		66.754.505					99.966.484		99.966.484		9,58	6,78			
			Terpenuhi nya kebutuhan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		6		10	0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		6		10	0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		6		10	0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		2		3						5		5		8,33	0			
		2.18.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.950.000		2.185.000		1.200.000		-		600.000					600.000		600.000		10	5,48		
			Terlaksana nya Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		6		10	0			
		2.18.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000		11.662.033		20.000.000		4.250.168		3.952.859					8.203.027		8.203.027		10	7,81		
			Tersediany a Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		6		10	0			
		2.18.0 1.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				270.000.000		51.638.012		9.750.272		3.460.000		2.910.000					6.370.000		6.370.000		10	2,36		
			Tersediany a Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		6		10	0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
					6		7		8		9		10		11		12				13				14 = 13	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	16	17
		2.18.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.087.605.260		30.091.491		224.400.000		25.501.811		59.291.646						84.793.457		84.793.457	8,33	7,8		
			Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		2		3					5		5			8,33	0		
		2.18.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.000.000.000		387.245.450		519.464.350		16.993.500		98.568.342					115.561.842		115.561.842	37,1	5,78			
			Tersedianya barang milik daerah (BMD) yang berfungsi dengan baik dan optimal dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		14		14		3		5					8		8			11,4	0		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	122		122		122		12 2		12 2					122		61			50	0		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1		1					1		0,5			50	0		
		2.18.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersediany a Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		14		14		3		5					8		8			11,4	0		
		2.18.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			200.000.000		38.060.000		34.071.850		5.710.000		9.728.550					15.438.550		15.438.550	50	7,72			
			Terlaksana nya Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	122		122		122		12 2		12 2					122		61			50	0		
		2.18.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.000.000.000		200.637.650		385.705.000		-		55.996.392					55.996.392		55.996.392	50	5,6			
			Terlaksana nya Pemelihara an/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1		1					1		0,5			50	0		
		2.18.0 1.2.13	Penataan Organisasi			1.221.020.000		118.532.500		2.200.000		-		-					-		-	10	0			
			Terlaksananya evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	60		12		12		2		4					6		6			10	0		
		2.18.0 1.2.13. 0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1.221.020.000		118.532.500		2.200.000		-		-					-		-	10	0			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
					I	II		III	IV	13	14 = 13	15=14/6 x100%	16	17												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	60		12		12		2		4					6		6		10	0			
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				196.731.366		38.781.750		7.400.000		600.000		5.000.000					5.600.000		5.600.000	0	2,9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Pertumbuhan Proyek (%)	6		0		2,00		0		0					0		0		0	0			
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	4,47			
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0			
	2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		49.182.842		15.691.750		1.200.000		600.000		-						600.000		600.000	0	1,22			
	2.18.02.2.01.0003	Ditetapkan nya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0			
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0							0		0		0	0		
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	Potensi Investasi		98.365.683		10.200.000		2.400.000		-		1.200.000						1.200.000		1.200.000	0	1,22			
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0							0		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0							0		0		0	0		
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
					6		7		8		9		10		11				12				13		14 = 13		15=14/6 x100%	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	16	17		
			n Modal Daerah Kabupaten /Kota																									
		2.18.0 2.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			49.182.842		5.100.000		1.200.000		-		600.000					600.000		600.000	0	1,22					
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0	0					
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			652.453.488		165.176.573		34.200.000		3.700.746		9.382.661					13.083.407		13.083.407	13	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal (%)	6,2		0		5,80		0		0					0		0		0	0					
		2.18.0 3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			652.453.488		165.176.573		34.200.000		3.700.746		9.382.661					13.083.407		13.083.407	13,3	2,01					
			Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		3		2		0		1				1		1		1	6,67	0					
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	5		1		2		0		1				1		1		1	20	0					
				2.18.0 3.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			422.453.488		159.176.573		33.000.000		3.700.746		8.782.661					12.483.407		12.483.407	6,67	2,95			
					Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		3		2		0		1				1		1		1	6,67	0			
2.18.0 3.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				230.000.000		6.000.000		1.200.000		-		600.000					600.000		600.000	20	0,26						
			Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	5		1		2		0		1				1		1		1	20	0					
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			2.051.973.097		199.710.497		452.784.500		30.603.911		205.102.125					235.706.036		235.706.036	15	11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
			Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan (%)	99,5		0		99,10		0		0					0		0		0	0					
		2.18.0 4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			2.051.973.097		199.710.497		452.784.500		30.603.911		205.102.125					235.706.036		235.706.036	15,4	11,5					
			Terlaksananya pelayanan penanaman modal yang berkualitas	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan	20		2		4		0		3				3		3		3	15	0					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
						I	II		III		IV		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%											
				Kabupaten/Kota (Dokumen)																													
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	9500																					4.2 36	1900	61 7	92 5	1.5 42	1.54 2	16,2	0
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	4750																					1.2 20	900	38 9	37 4	763	763	16,1	0
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha	11000																					4.2 36	2200	62 5	95 5	1.5 80	1.58 0	14,4	0
	2.18.0 4.2.01. 0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		183.153.000		6.000.000		2.400.000		-		1.800.000					1.800.000		1.800.000	15	0,98											
	2.18.0 4.2.01. 0006		Terlaksana nya Koordinasi dan Sinkronisa si Penetapan Pemberian Fasilitas/I nsentif Daerah Kewenang an Daerah Kabupaten /Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20		2		4		0	3		175.455.582			3		195.458.609	3	195.458.609	16,2	49,3											
	2.18.0 4.2.01. 0007		Tersediany a Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegra si secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	9500		4.2 36		1900		61 7	92 5		600.000				1.5 42		1.54 2		1.200.000	1.200.000	16,1	0,1									
			Tersediany a dan terkelolany a Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4750		1.2 20		900		38 9	37 4					763		763			16,1	0											

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						6		7		8		9		10		11				12				13		14 = 13
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	16	17
			Terintegra si secara Elektronik																							
		2.18.0 4.2.01. 0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		216.120.540		18.843.591		103.350.000		10.000.884		27.246.543					37.247.427		37.247.427	14,4	17,2			
				Terlaksana nya pemantau an, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten /Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11000		4.2 36		2200		62 5		95 5				1.5 80		1.58 0		14,4	0			
		2.18.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				395.143.939		54.913.509		43.700.000		4.799.349		13.602.661				18.402.010		18.402.010	5	4,7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Meningkatnya pelaku usaha/investor tertib LKPM	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)	27		0		23		0		0				0		0		0	0			
		2.18.0 5.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			395.143.939		54.913.509		43.700.000		4.799.349		13.602.661				18.402.010		18.402.010	4,97	4,66			
				Terlaksananya fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	620		126		124		12		18				30		30		4,84	0			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		1200		120		240		0		25				25		25		2,08	0				
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		150		16		30		1		11				12		12		8	0				
		2.18.0 5.2.01. 0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			53.125.000		10.625.000		3.000.000		600.000		1.200.000				1.800.000		1.800.000	4,84	3,39			
				Terlaksana nya Penyelesai an Permasala han dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisas	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	620		126		124		12		18				30		30		4,84	0			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
				I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			ikan Kegiatan Usahanya																							
		2.18.0 5.2.01. 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				121.125.000		24.225.000		2.300.000		-		2.300.000					2.300.000		2.300.000	2,08	1,9		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	1200		120		240		0		25					25		25		2.08	0			
		2.18.0 5.2.01. 0006	Pengawasan Penanaman Modal				220.893.939		20.063.509		38.400.000		4.199.349		10.102.661					14.302.010		14.302.010	8	6,47		
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	150		16		30		1		11					12		12		8	0			
		2.18.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				705.284.896		168.303.009		34.200.000		3.299.349		9.982.661					13.282.010		13.282.010	0	1,9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		0		100		0		0		0				0		0		0	0		
		2.18.0 6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				705.284.896		168.303.009		34.200.000		3.299.349		9.982.661					13.282.010		13.282.010	0	1,88		
			Terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	10		2		2		0		0					0		0		0	0			
		2.18.0 6.2.01. 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem				705.284.896		168.303.009		35.200.000		3.299.349		9.982.661					13.282.010		13.282.010	0	1,88		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	16	17
			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																							
			Tersediany a Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaat kan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	10		2		2		0		0				0		0		0		0	0		
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH			581.507.000		162.223.700		-		-		-				-		-		-	0	0		
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			581.507.000		162.223.700		-		-		-				-		-		-	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya implementasi budaya inovasi pemerintahan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik (%)	100		0		100		0		0		0			0		0		0	0			
		4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan			581.507.000		162.223.700		-		-		-				-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penerapan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0		0		0				0		0		0		0	0		
		4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			581.507.000		162.223.700		-		-		-				-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0		0		0				0		0		0		0	0		
																							0	0		
			JUMLAH			34.537.275.551		6.423.570.102		6.903.764.832		478.303.897		1.857.885.416				2.336.189.313		2.336.189.313						
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				11,13	6,76		
			Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Komitmen dan kerjasama tim kerja, Upaya inovasi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan tupoksi, Upaya kolaborasi/sinergi dengan stakeholder
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Penyesuaian terhadap beberapa kali kebijakan alokasi pagu anggaran OPD, Penyesuaian terhadap kebijakan penundaan pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	a. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen maupun kerjasama seluruh jajaran pada lingkungan Perangkat Daerah guna mewujudkan kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil; b. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, dengan menerapkan budaya kinerja yang baik; c. Perkuat kolaborasi lintas sektor untuk optimalisasi pencapaian target kinerja program dan sasaran; d. Meningkatkan kecermatan dalam perencanaan yang mendukung tercapainya TUK. Sejak proses perencanaan telah teridentifikasi hambatan yang akan dilalui, melakukan antisipasi sejak awal; e. Melakukan evaluasi dan perbaikan terkait penyusunan anggaran kas sesuai dengan kebutuhan

Sumber : <https://sipd.kemendagri.go.id/dalev/>

Tanggal : 14 Agustus 2026

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Perubahan aturan terkait tidak diterimaknya honor PPK;
- b. Frekuensi biaya telepon/internet yang fluktuatif;
- c. Perubahan Regulasi Pembayaran Gaji P3K Paruh Waktu.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2026 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

3.1. Penyesuaian Rencana Kinerja Tahun 2026

Penyesuaian target kinerja pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Penyesuaian Target Kinerja pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Penyesuaian Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Renstra Tahun 2025-2029				
	a. Pertumbuhan nilai investasi	persen	20,92	11,79	14
	b. Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Milyar Rupiah	754,86	475,52	566,42
II.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Tahun 2025-2029				
	a. Persentase peningkatan investasi	persen	3,82	5,04	5,04

Target indikator kinerja pertumbuhan realisasi investasi didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- a. Penyusunan target tetap mempertimbangkan kapasitas potensi asli daerah dan selalu berhati-hati dalam menyikapi lonjakan realisasi investasi yang bersifat temporer;
- b. Alasan Penetapan Target Pesimis: Efek *Base Year* yang terlalu tinggi/tahun dasar untuk hitung target $n+1$ nilainya sudah eksepsional. Jika Realisasi n nya "melejit" karena anomali, maka kalau dipaksa naik lagi akan jadi tidak realistis.
- c. Mengingat banyaknya faktor pembentuk angka Realisasi yang tidak seluruhnya dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah;

3.2. Perubahan Rencana Pendanaan Tahun 2026

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BANTUL
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								7.224.095.736,00	7.035.271.832,39	6.911.014.832,39	-313.080.903,61						14.198.117.256,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.042.588.736,00	6.853.764.832,39	6.911.014.832,39	-131.573.903,61							14.198.117.256,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.042.588.736,00	6.853.764.832,39	6.911.014.832,39	-131.573.903,61							14.198.117.256,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83,90 88,11 nilai angka	83,90 88,11 Nilai Angka	6.329.101.404,00	6.281.480.332,39	6.366.480.332,39	6.194.502.852,00							12.523.604.256,00	
		-	-	-	-	-	-	-	6.329.101.404,00	6.281.480.332,39	6.366.480.332,39	-	-	-	-	-	-	-	12.523.604.256,00	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul				100 persen	100 persen	16.100.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-12.650.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		152.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-6.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			118.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	600.000,00	600.000,00	-3.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.600.000,00	600.000,00	600.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				100 persen	100 persen	4.980.070.730,00	5.396.885.300,39	5.429.785.300,39	449.714.570,39			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul		5.052.435.128,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.911.310.730,00	5.328.725.300,39	5.378.725.300,39	467.414.570,39	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			4.968.335.128,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	68.760.000,00	68.160.000,00	51.060.000,00	-17.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			84.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100 persen	100 persen	34.319.600,00	2.400.000,00	25.100.000,00	-9.219.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul		475.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	70 Orang	34.319.600,00	2.400.000,00	25.100.000,00	-9.219.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			475.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	---------------	--------------	---------------	---------------	--	-------------------------	--	--	--	--	----------------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 persen	100 persen	597.841.722,00	101.730.410,00	129.046.310,00	-468.795.412,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.471.400.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.541.860,00	6.297.930,00	6.297.930,00	-3.243.930,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			489.424.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	226.203.780,00	9.590.000,00	30.071.100,00	-196.132.680,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.608.292,00	31.183.280,00	32.686.280,00	-6.922.012,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	78.161.790,00	3.891.200,00	8.021.000,00	-70.140.790,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			482.703.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	6.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-5.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			6.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	36.245.000,00	11.100.000,00	11.850.000,00	-24.395.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			16.672.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	187.954.000,00	36.968.000,00	37.420.000,00	-150.534.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			980.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.227.000,00	600.000,00	600.000,00	-5.627.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	7.300.000,00	600.000,00	600.000,00	-6.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	259.576.052,00	255.350.272,00	259.754.172,00	178.120,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		668.603.798,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.184.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-984.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			2.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	16.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.105.000,00	9.750.272,00	11.654.172,00	-18.450.828,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	207.287.052,00	224.400.000,00	230.400.000,00	23.112.948,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			543.413.798,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	324.193.300,00	519.464.350,00	515.644.550,00	191.451.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		2.503.965.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	152.951.450,00	99.687.500,00	99.687.500,00	-53.263.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				122 Unit	122 Unit	42.831.850,00	34.071.850,00	34.071.850,00	-8.760.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	128.410.000,00	385.705.000,00	381.885.200,00	253.475.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			1.403.965.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul				100 persen	100 persen	117.000.000,00	2.200.000,00	3.700.000,00	-113.300.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen	12 Dokumen	117.000.000,00	2.200.000,00	3.700.000,00	-113.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Proyek				433 proyek	2 persen	36.310.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	200.190.000,00							236.500.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota				1 dokumen	1 dokumen	26.110.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-21.110.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		128.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	14.960.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-13.760.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			86.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11.150.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-7.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi				2 peta potensi	1 peta potensi	10.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-7.800.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	108.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			56.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			51.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal				3 peminat	5,80 persen	167.312.536,00	34.200.000,00	35.200.000,00	305.725.464,00							473.038.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah				100 persen	100 persen	167.312.536,00	34.200.000,00	35.200.000,00	-132.112.536,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	473.038.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	161.312.536,00	33.000.000,00	34.000.000,00	-127.312.536,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			318.538.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			154.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan				93,3 persen	99,10 persen	318.229.924,00	452.784.500,00	420.234.500,00	99.380.076,00							417.610.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal				3000 legalitas	3000 legalitas	318.229.924,00	452.784.500,00	420.234.500,00	102.004.576,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	417.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1900 Pelaku Usaha	1900 Pelaku Usaha	194.962.816,00	347.634.500,00	310.884.500,00	115.921.684,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																			
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				900 Pelaku Usaha	900 Pelaku Usaha	17.929.800,00	2.400.000,00	3.600.000,00	-14.329.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			287.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																			
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				2200 Kegiatan Usaha	2200 Kegiatan Usaha	99.337.308,00	100.350.000,00	103.350.000,00	4.012.692,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			35.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Pelaku Usaha Tertib LKPM				475.52 milyar	23 persen	72.877.436,00	43.700.000,00	46.500.000,00	357.359.564,00							430.237.000,00		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan				8 perusahaan	8 perusahaan	72.877.436,00	43.700.000,00	46.500.000,00	-26.377.436,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		430.237.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya																			
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				124 Kegiatan Usaha.	124 Kegiatan Usaha.	10.625.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00	-5.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			142.229.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	24.540.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-22.240.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			220.090.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	37.712.436,00	38.400.000,00	39.400.000,00	1.687.564,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			67.917.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal				100 persen	100 persen	118.757.436,00	34.200.000,00	35.200.000,00	-1.629.436,00							117.128.000,00		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota				3 jenis data	3 jenis data	118.757.436,00	34.200.000,00	35.200.000,00	-83.557.436,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	118.757.436,00	34.200.000,00	35.200.000,00	-83.557.436,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00							0,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				100 persen	0 Persen	181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00							0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan				1 inovasi	0 Persen	181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								7.224.095.736,00	7.035.271.832,39	6.911.014.832,39	-313.080.903,61							14.198.117.256,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 persen	100 persen	597.841.722,00	101.730.410,00	129.046.310,00	-468.795.412,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.471.400.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.541.860,00	6.297.930,00	6.297.930,00	-3.243.930,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			489.424.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	226.203.780,00	9.590.000,00	30.071.100,00	-196.132.680,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.608.292,00	31.183.280,00	32.686.280,00	-6.922.012,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	78.161.790,00	3.891.200,00	8.021.000,00	-70.140.790,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			482.703.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	6.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-5.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			6.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	36.245.000,00	11.100.000,00	11.850.000,00	-24.395.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			16.672.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	187.954.000,00	36.968.000,00	37.420.000,00	-150.534.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			980.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.227.000,00	600.000,00	600.000,00	-5.627.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	7.300.000,00	600.000,00	600.000,00	-6.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	259.576.052,00	255.350.272,00	259.754.172,00	178.120,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		668.603.798,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.184.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-984.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			2.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	16.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.105.000,00	9.750.272,00	11.654.172,00	-18.450.828,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	207.287.052,00	224.400.000,00	230.400.000,00	23.112.948,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			543.413.798,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	324.193.300,00	519.464.350,00	515.644.550,00	191.451.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		2.503.965.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	152.951.450,00	99.687.500,00	99.687.500,00	-53.263.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbas sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				122 Unit	122 Unit	42.831.850,00	34.071.850,00	34.071.850,00	-8.760.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	128.410.000,00	385.705.000,00	381.885.200,00	253.475.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			1.403.965.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul				100 persen	100 persen	117.000.000,00	2.200.000,00	3.700.000,00	-113.300.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen	12 Dokumen	117.000.000,00	2.200.000,00	3.700.000,00	-113.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Proyek				433 proyek	2 persen	36.310.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	200.190.000,00							236.500.000,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota				1 dokumen	1 dokumen	26.110.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-21.110.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		128.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	14.960.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-13.760.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			86.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11.150.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-7.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi				2 peta potensi	1 peta potensi	10.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-7.800.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		108.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			56.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			51.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal				3 peminat	5,80 persen	167.312.536,00	34.200.000,00	35.200.000,00	305.725.464,00							473.038.000,00		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah				100 persen	100 persen	167.312.536,00	34.200.000,00	35.200.000,00	-132.112.536,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		473.038.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	161.312.536,00	33.000.000,00	34.000.000,00	-127.312.536,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			318.538.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			154.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan				93,3 persen	99,10 persen	318.229.924,00	452.784.500,00	420.234.500,00	99.380.076,00							417.610.000,00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal				3000 legalitas	3000 legalitas	318.229.924,00	452.784.500,00	420.234.500,00	102.004.576,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		417.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1900 Pelaku Usaha	1900 Pelaku Usaha	194.962.816,00	347.634.500,00	310.884.500,00	115.921.684,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				900 Pelaku Usaha	900 Pelaku Usaha	17.929.800,00	2.400.000,00	3.600.000,00	-14.329.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			287.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				2200 Kegiatan Usaha	2200 Kegiatan Usaha	99.337.308,00	100.350.000,00	103.350.000,00	4.012.692,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			35.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Pelaku Usaha Tertib LKPM				475.52 milyar	23 persen	72.877.436,00	43.700.000,00	46.500.000,00	357.359.564,00							430.237.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan				8 perusahaan	8 perusahaan	72.877.436,00	43.700.000,00	46.500.000,00	-26.377.436,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		430.237.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				124 Kegiatan Usaha.	124 Kegiatan Usaha.	10.625.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00	-5.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			142.229.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	24.540.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-22.240.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			220.090.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	37.712.436,00	38.400.000,00	39.400.000,00	1.687.564,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			67.917.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal				100 persen	100 persen	118.757.436,00	34.200.000,00	35.200.000,00	-1.629.436,00							117.128.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota				3 jenis data	3 jenis data	118.757.436,00	34.200.000,00	35.200.000,00	-83.557.436,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	118.757.436,00	34.200.000,00	35.200.000,00	-83.557.436,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				100 persen	0 Persen	181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00							0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan				1 inovasi	0 Persen	181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	181.507.000,00	181.507.000,00	0,00	-181.507.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								7.224.095.736,00	7.035.271.832,39	6.911.014.832,39	-313.080.903,61							14.198.117.256,00	

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja>

Tanggal : 14 Agustus 2026

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender/PUG adalah **strategi** untuk **mengintegrasikan gender** sebagai dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 (RPJMN 2025–2029), gender dan inklusi sosial menjadi satu dari lima pendekatan pengarusutamaan pembangunan. RKPD Kab. Bantul 2026 ditetapkan lewat Peraturan Bupati. Di dalamnya Anggaran Responsif Gender/ARG merupakan salah satu instrumen wajib dalam perencanaan & penganggaran daerah sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai OPD pelayanan perizinan & penanaman modal berkomitmen mengarusutamakan Gender dalam pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan penanaman modal tahun 2026. Pada Rencana Kerja Perubahan 2026, meskipun terdapat pergeseran anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tetap menyelenggarakan aktivitas kegiatan untuk:

- ✓ Peningkatan akses layanan perizinan dan investasi yang setara, adil dan tanpa diskriminasi;
- ✓ Penyediaan data perizinan terpilah gender sebagai dasar evaluasi kebijakan;
- ✓ Penguatan kapasitas SDM dalam penerapan PUG.

Dengan demikian, pergeseran anggaran diarahkan agar tidak mengurangi kualitas layanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas."

Sejalan dengan amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Bantul tentang RKPD Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menjadikan **keterbukaan informasi sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel**. Sebagai institusi pelayanan publik dan perizinan, DPMPSTP memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap

informasi terkait pelayanan, anggaran, dan kinerja dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Di tengah efisiensi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tetap memprioritaskan program yang mendukung keterbukaan informasi. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah:

- ✓ Kebutuhan informasi dari masyarakat dan pelaku usaha yang semakin meningkat seiring digitalisasi perizinan melalui OSS.
- ✓ Perlunya penyediaan data yang tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dipahami, akurat, dan mutakhir.
- ✓ Penguatan peran PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul agar mampu merespon permohonan informasi secara cepat dan tepat waktu.

Dalam Renja Perubahan 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menetapkan arah kebijakan keterbukaan informasi melalui 3 strategi utama:

❖ Peningkatan Keterbukaan Informasi Proaktif

Melakukan publikasi rutin melalui website dpmptsp.bantulkab.go.id dan media sosial terkait: Standar Pelayanan, Alur Perizinan OSS, Realisasi Investasi, Jumlah Izin Terbit, dan Pelaksanaan Anggaran. Hal ini bertujuan memberikan kepastian dan mencegah praktik pungli;

❖ Optimalisasi Layanan PPID Pembantu;

Memastikan setiap permohonan informasi diproses sesuai SOP PPID dengan waktu maksimal 10 hari kerja. Petugas PPID diberikan penguatan kapasitas agar mampu melayani secara inklusif kepada kelompok rentan, perempuan, dan penyandang disabilitas;

❖ Penguatan Transparansi Berbasis Data;

Menyediakan data perizinan dan investasi yang terpilah berdasarkan jenis usaha dan jenis kelamin pemohon. Data ini menjadi dasar evaluasi kebijakan dan bentuk dukungan terhadap Pengarusutamaan Gender di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Dengan implementasi keterbukaan informasi ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berupaya tidak hanya menjadi lembaga pemberi izin, tetapi juga menjadi lembaga kepercayaan publik. Transparansi diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi, akuntabilitas anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Bantul.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Selanjutnya, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2026.

